



DIPLOMASI MILITER INDONESIA DALAM UNIFIL: MODEL PENGUATAN PERSONEL SATGAS MCOU BERBASIS MANAJEMEN SDM

*Indonesian Military Diplomacy in UNIFIL: A Human Resource Management-Based Model
for Strengthening MCOU Task Force Personnel*

Bayu Setia Yogasara, Ari Pitoyo Sumarno, Mhd Halkis,
Prodi Strategi Pertahanan Darat, FSP, Unhan RI

Email: Yogasara08@gmail.com

Abstract

Indonesia's participation in United Nations (UN) peacekeeping missions has long been an integral component of its defense diplomacy. The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) represents one of the most strategic missions, where Indonesian troops play a pivotal role, particularly through the Military Community Outreach Unit (MCOU) Task Force. This article analyzes a model for strengthening MCOU personnel by applying perspectives from human resource management (HRM), military strategy, and defense diplomacy. The findings indicate that the effectiveness of the MCOU Task Force largely depends on multidimensional, competency-based selection; intensive training supported by modern technology; mastery of military diplomacy; and mental preparedness combined with cross-cultural communication skills. The study underscores that Indonesia's military diplomacy is not solely reflected in the deployment of troops, but also in the continuous improvement of human capital that serves as ambassadors of peace.

Keywords: military diplomacy, UNIFIL, Indonesian Armed Forces (TNI), MCOU, human resource management

Abstrak

Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan bagian integral dari diplomasi pertahanan. United Nations

Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menjadi salah satu misi yang menempatkan pasukan Indonesia pada peran strategis, khususnya melalui Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU). Artikel ini menganalisis model penguatan personel Satgas MCOU UNIFIL dengan menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia (MSDM), strategi militer, dan diplomasi pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Satgas MCOU sangat bergantung pada seleksi berbasis kompetensi multidimensi, pelatihan intensif dengan teknologi modern, penguasaan diplomasi militer, serta kesiapan mental dan komunikasi lintas budaya. Kajian ini menegaskan bahwa diplomasi militer Indonesia tidak hanya tercermin dalam pengerahan pasukan, tetapi juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berperan sebagai duta perdamaian.

Kata kunci: diplomasi militer, UNIFIL, TNI, MCOU, manajemen sumber daya manusia

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1957. Sejak keikutsertaan pertamanya dalam United Nations Emergency Force (UNEF) di Timur Tengah, Indonesia telah secara konsisten menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas global. Hingga tahun 2023, Indonesia menempati posisi kedelapan dunia dengan mengirimkan lebih dari 2.700 personel pada sembilan misi perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping, n.d.-b). Reputasi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam operasi perdamaian, terutama di kawasan rawan konflik.

Dalam konteks **United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)**, Indonesia menempatkan Satgas *Military Community Outreach Unit* (MCOU) sebagai komponen penting dalam mendukung mandat PBB. Satgas ini memiliki tugas utama menjembatani hubungan sipil–militer serta membangun kepercayaan masyarakat Lebanon terhadap keberadaan pasukan penjaga perdamaian. Diplomasi militer Indonesia dalam misi ini bukan hanya terkait pengerahan kekuatan militer, melainkan juga mencakup pembangunan *soft power* melalui interaksi dengan komunitas lokal, pelaksanaan program outreach, serta kemampuan adaptasi terhadap budaya setempat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Satgas MCOU menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, kondisi geografis Lebanon yang ekstrem—mulai dari suhu panas lebih dari 40°C di musim panas hingga hampir nol derajat di musim dingin—sering menimbulkan kelelahan fisik dan gangguan

kesehatan personel (Habibie Center, 2023). Kedua, kompleksitas politik Lebanon dengan kehadiran aktor non-negara seperti Hezbollah menuntut pemahaman geopolitik mendalam dari setiap personel (Jowell, 2018). Ketiga, kendala bahasa dan komunikasi lintas budaya menjadi hambatan serius, mengingat mayoritas masyarakat Lebanon menggunakan bahasa Arab, sementara sebagian besar personel Indonesia hanya menguasai bahasa Inggris tingkat dasar (Hymes, 1974). Keempat, keterbatasan teknologi dalam pengumpulan data situasional di lapangan memperlambat respons operasional.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan personel yang sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan **manajemen sumber daya manusia (MSDM)** menjadi kerangka yang relevan dalam menyiapkan personel sebelum penugasan. Dessler (2020) menegaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada seleksi ketat, pelatihan intensif, serta kesesuaian antara individu dan misi organisasi. Dalam konteks Satgas MCOU UNIFIL, proses seleksi tidak boleh hanya menitikberatkan pada aspek fisik, melainkan juga harus mencakup kemampuan bahasa, kecerdasan emosional, serta keterampilan diplomasi militer.

Selanjutnya, pelatihan berbasis simulasi modern menjadi kebutuhan mendesak. Studi Curran (2024) menunjukkan bahwa *elicitive training* yang menekankan *contact skills*—seperti komunikasi, mediasi, dan negosiasi—lebih efektif dalam membekali peacekeepers menghadapi situasi kompleks dibandingkan metode preskriptif tradisional. Penggunaan teknologi **virtual reality (VR)** dan **augmented reality (AR)** dalam pelatihan juga terbukti meningkatkan kesiapan personel dengan memberikan pengalaman realistis sebelum bertugas (Holohan, 2019). Dengan pendekatan ini, personel dapat lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan politik di Lebanon.

Selain pelatihan, aspek **kesehatan mental** menjadi faktor krusial. Tekanan psikologis akibat penugasan di daerah konflik dapat menyebabkan stres berkepanjangan. Lincoln dan Guba (1985) menekankan pentingnya sistem dukungan psikologis berkelanjutan untuk memastikan ketahanan mental prajurit. Dalam praktik internasional, studi terbaru oleh Bellamy dan Hunt (2021) juga menyoroti bahwa keberhasilan misi perdamaian sangat ditentukan oleh kemampuan pasukan menjaga stabilitas emosional dalam menghadapi ketidakpastian dan ancaman. Oleh karena itu, program psikologis yang melibatkan tenaga ahli militer perlu menjadi bagian integral dari strategi penguatan Satgas.

Dari perspektif **diplomasi militer**, kehadiran Satgas MCOU tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Wiseman (2011) menyebut diplomasi militer sebagai instrumen *soft power* yang mampu mendukung kebijakan luar negeri melalui



kerjasama militer multinasional. Dengan interaksi yang efektif bersama masyarakat lokal, Indonesia memperkuat citranya sebagai negara kontributor aktif perdamaian dunia. Sebagaimana ditegaskan oleh Diehl dan Balas (2014), keberhasilan peacekeeping sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat lokal terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Lebih jauh, pemanfaatan **teknologi canggih** juga menjadi bagian penting dari model penguatan personel. Penggunaan drone untuk pemantauan wilayah, sistem komunikasi digital, dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan kesadaran situasional dan mempercepat pengambilan keputusan strategis (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Hal ini sejalan dengan tren modernisasi operasi perdamaian yang menekankan efisiensi dan keamanan personel.

Dengan demikian, model penguatan personel Satgas MCOU UNIFIL berbasis MSDM mencakup lima dimensi utama: (1) seleksi berbasis kompetensi multidimensi; (2) pelatihan berbasis teknologi modern; (3) dukungan psikologis berkelanjutan; (4) peningkatan keterampilan bahasa dan komunikasi lintas budaya; serta (5) pemanfaatan teknologi canggih untuk mendukung efektivitas operasional. Model ini selaras dengan mandat PBB dalam menjaga perdamaian sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi pertahanan global.

Diplomasi militer Indonesia di UNIFIL menegaskan bahwa keberhasilan peacekeeping tidak hanya bergantung pada pengerahan pasukan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Satgas MCOU sebagai representasi TNI berfungsi ganda: menjaga stabilitas di Lebanon dan mengangkat citra Indonesia di arena internasional. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan personel melalui kerangka MSDM, teknologi, dan diplomasi militer adalah kunci untuk memastikan efektivitas kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai penguatan personel dalam misi perdamaian internasional perlu ditopang oleh landasan teori yang kuat, salah satunya melalui perspektif manajemen sumber daya manusia (MSDM). Dessler (2020) menegaskan bahwa efektivitas organisasi, termasuk militer, sangat ditentukan oleh bagaimana proses seleksi, pelatihan, dan kesesuaian antara individu dengan organisasi dikelola secara strategis. Seleksi yang ketat tidak hanya bertujuan memilih personel dengan kualifikasi fisik terbaik, tetapi juga menekankan pada aspek kecerdasan emosional, adaptasi budaya, dan kemampuan komunikasi lintas budaya. Dalam konteks pasukan penjaga perdamaian, prinsip *person-organization fit* menjadi sangat penting



karena personel tidak hanya dituntut berfungsi sebagai prajurit, tetapi juga sebagai duta negara yang membawa nilai diplomasi militer. Pelatihan yang intensif menjadi tahapan berikutnya untuk membekali personel dengan keterampilan teknis maupun non-teknis, mulai dari penguasaan senjata hingga kemampuan mediasi dalam konflik sosial. Dengan demikian, kerangka MSDM memberikan pemahaman bahwa kualitas individu yang terpilih, dilatih, dan disiapkan secara menyeluruh merupakan penentu utama efektivitas Satgas MCOU dalam menjalankan mandat PBB.

Selain perspektif MSDM, teori strategi militer juga menjadi pijakan penting dalam memahami posisi Satgas MCOU UNIFIL dalam diplomasi pertahanan Indonesia. Clausewitz (1989) dalam karyanya *On War* menegaskan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Pemikiran ini menempatkan operasi militer sebagai instrumen yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik negara (Mahroza, 2022). Dalam konteks misi perdamaian, pasukan penjaga perdamaian tidak menjalankan perang dalam arti tradisional, melainkan menggunakan sarana militer untuk mencapai tujuan politik berupa stabilitas, perdamaian, dan perlindungan warga sipil. Strategi militer di sini dipahami sebagai upaya untuk menghubungkan kebijakan luar negeri Indonesia dengan pengerahan pasukan dalam misi multinasional. Keikutsertaan Satgas MCOU bukan sekadar kontribusi teknis, tetapi representasi kepentingan politik Indonesia di arena internasional. Dengan demikian, teori Clausewitz relevan untuk menjelaskan bahwa penguatan personel bukan hanya soal kesiapan tempur, tetapi juga kesiapan diplomatik dalam menunjang tujuan strategis negara.

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah teori perilaku organisasi, yang memberikan kerangka analisis terhadap dinamika internal maupun eksternal pasukan dalam menjalankan misi. Robbins dan Judge (2022) menyatakan bahwa perilaku organisasi meneliti dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap efektivitas organisasi. Dalam konteks Satgas MCOU, kepemimpinan komandan, kualitas komunikasi antaranggota, dan budaya organisasi menjadi faktor kunci yang memengaruhi kinerja kolektif. Hambatan internal seperti perbedaan budaya organisasi antarunsur pasukan multinasional, maupun hambatan eksternal seperti resistensi masyarakat lokal, dapat memengaruhi efektivitas operasi. Dengan kerangka ini, penguatan personel tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis, tetapi juga dari aspek psikologis, motivasi, dan interaksi sosial. Teori perilaku organisasi menegaskan bahwa keberhasilan pasukan penjaga perdamaian banyak ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu membangun sinergi, mengelola konflik internal, dan beradaptasi dengan konteks eksternal.

Sementara itu, teori diplomasi militer menekankan peran militer sebagai instrumen *soft power* dalam diplomasi internasional. Wiseman (2011) menjelaskan



bahwa diplomasi militer merupakan penggunaan angkatan bersenjata dalam operasi selain perang untuk mendukung kepentingan diplomatik negara. Partisipasi Indonesia dalam UNIFIL dapat dipahami sebagai praktik nyata dari diplomasi militer, di mana TNI tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat reputasi Indonesia sebagai aktor perdamaian global. Kehadiran Satgas MCOU di Lebanon memperlihatkan wajah militer yang humanis, yang mampu membangun kepercayaan masyarakat lokal melalui kegiatan outreach, pelayanan sosial, dan komunikasi lintas budaya. Dengan demikian, diplomasi militer tidak hanya memperkuat legitimasi misi PBB, tetapi juga meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perdamaian internasional.

Terakhir, teori *elicitive training* yang diperkenalkan oleh Lederach (1996) dan diperbarui dalam studi Curran (2024) memberikan perspektif penting terkait pelatihan personel. Berbeda dari model preskriptif yang menekankan transfer pengetahuan satu arah, *elicitive training* berfokus pada pengalaman dan keterampilan implisit yang dimiliki oleh peserta. Dalam konteks peacekeeping, pendekatan ini menekankan pentingnya *contact skills* seperti komunikasi empatik, mediasi, fasilitasi, dan negosiasi. Curran (2024) menegaskan bahwa model ini lebih efektif dalam mempersiapkan personel menghadapi situasi kompleks di lapangan, karena peacekeepers dituntut untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sipil yang beragam secara budaya dan politik. Dengan pendekatan ini, pelatihan tidak hanya menanamkan prosedur teknis, tetapi juga membangun kesadaran reflektif tentang dampak kehadiran pasukan terhadap dinamika sosial.

Secara keseluruhan, kelima kerangka teori ini saling melengkapi dalam memberikan landasan analitis bagi penelitian tentang penguatan personel Satgas MCOU UNIFIL. Teori MSDM menyoroti aspek seleksi dan pelatihan, strategi militer menekankan relevansi politik dari operasi perdamaian, perilaku organisasi menekankan dinamika internal-eksternal, diplomasi militer menegaskan fungsi *soft power*, dan *elicitive training* memberikan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kompetensi personel. Integrasi berbagai teori ini memungkinkan penelitian untuk memahami secara holistik tantangan, strategi, dan relevansi diplomasi militer Indonesia dalam misi UNIFIL.

Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis strategi penguatan personel Satgas *Military Community Outreach Unit* (MCOU) UNIFIL. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap proses,

pengalaman, dan strategi yang dijalankan oleh Satgas dalam konteks misi perdamaian PBB. Menurut Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna yang diberikan individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial, serta menafsirkan pengalaman mereka secara kontekstual. Oleh karena itu, metode ini dipandang sesuai untuk menggali dinamika kompleks yang dihadapi personel TNI dalam menjalankan diplomasi militer di Lebanon.

Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu unit analisis yang spesifik, yakni Satgas MCOU UNIFIL sebagai representasi kontribusi Indonesia dalam operasi perdamaian internasional. Yin (2018) menegaskan bahwa studi kasus relevan digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” atas suatu fenomena kontemporer, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Melalui studi kasus, penelitian ini tidak hanya memotret aspek teknis seleksi dan pelatihan personel, tetapi juga mengkaji dimensi diplomasi militer dan relevansi strategi penguatan SDM terhadap tujuan politik luar negeri Indonesia.

Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam proses seleksi, pelatihan, maupun penugasan di Lebanon, termasuk komandan Satgas, staf PMPP TNI, dan pejabat Kementerian Pertahanan. Wawancara semi-terstruktur dipilih untuk memberikan fleksibilitas kepada informan dalam menyampaikan pengalaman, sekaligus menjaga fokus sesuai tujuan penelitian (Kvale & Brinkmann, 2015). Selain wawancara, observasi partisipatif terbatas juga dilakukan, khususnya dalam kegiatan pelatihan pra-penugasan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti mandat UNIFIL yang diterbitkan PBB, laporan tahunan PMPP TNI, kebijakan pertahanan Indonesia (UU No. 34 Tahun 2004 dan Keppres No. 85 Tahun 2011), serta literatur akademik mengenai manajemen SDM, strategi militer, perilaku organisasi, dan diplomasi pertahanan. Kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan adanya triangulasi, yang menurut Denzin (2012) berfungsi meningkatkan kredibilitas penelitian melalui perbandingan berbagai sumber informasi.

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2019). Model ini meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi sesuai kategori tematik, misalnya “strategi seleksi” atau “pelatihan berbasis teknologi.” Penyajian data kemudian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga pola hubungan antarvariabel dapat terlihat.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat iteratif, yaitu dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dengan temuan lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini mengacu pada kriteria *trustworthiness* yang diperkenalkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumen) dan triangulasi sumber (informan dari berbagai latar belakang). Transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi kontekstual yang mendetail agar pembaca dapat menilai relevansi hasil penelitian pada situasi lain. Dependabilitas dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, sementara konfirmabilitas diperoleh dengan memisahkan interpretasi peneliti dari data empiris yang tervalidasi.

Dengan kerangka metodologis ini, artikel berupaya mengungkap secara holistik strategi penguatan personel Satgas MCOU UNIFIL. Pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus memungkinkan penelitian menggali makna dan dinamika diplomasi militer Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi penguatan peran Indonesia dalam operasi perdamaian PBB.

Pembahasan

Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berlangsung lebih dari enam dekade. Sejak pertama kali mengirimkan pasukan pada tahun 1957, Indonesia menunjukkan konsistensi dalam memperkuat reputasinya sebagai kontributor utama pasukan penjaga perdamaian dunia. Hingga tahun 2023, Indonesia tercatat menempati peringkat kedelapan dunia dengan lebih dari 2.700 personel aktif di sembilan misi perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping, n.d.-b). Salah satu misi yang menonjol adalah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di mana Satgas *Military Community Outreach Unit* (MCOU) memainkan peran strategis sebagai penghubung sipil-militer. Kehadiran Satgas ini tidak hanya memperlihatkan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga menegaskan peran diplomasi militer Indonesia sebagai instrumen *soft power* di kancah internasional.

Pentingnya peran Satgas MCOU dalam UNIFIL dapat dilihat dari mandat yang diembannya. Pasukan ini ditugaskan membangun komunikasi dengan komunitas lokal, menjalankan program outreach, serta menjaga stabilitas keamanan melalui koordinasi sipil-militer. Namun, dinamika lapangan di Lebanon menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Kompleksitas politik domestik yang dipengaruhi keberadaan Hezbollah, kondisi geografis yang ekstrem, hingga kendala bahasa dan

perbedaan budaya, semuanya menuntut strategi penguatan personel yang sistematis. Artikel ini menganalisis tiga aspek utama yang menentukan keberhasilan diplomasi militer Indonesia di UNIFIL, yaitu strategi penguatan sumber daya manusia dan landasan strategi militer, diplomasi militer dalam interaksi dengan komunitas lokal, serta pembelajaran dari pengalaman lapangan melalui sumber primer.

Penguatan sumber daya manusia merupakan aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam mengkaji efektivitas Satgas MCOU UNIFIL. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) militer berbeda dengan organisasi sipil karena menuntut kesiapan fisik, disiplin, dan kemampuan bertahan dalam kondisi ekstrem. Dessler (2020) menegaskan bahwa efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh seleksi ketat, pelatihan intensif, dan kesesuaian individu dengan misi organisasi. Dalam konteks Satgas MCOU, seleksi harus melampaui kriteria fisik standar, mencakup pula kemampuan berbahasa, pemahaman geopolitik kawasan, dan kecerdasan emosional untuk berinteraksi dengan masyarakat sipil.

Clausewid (1989) mengingatkan bahwa operasi militer adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Dengan demikian, pengerahan Satgas MCOU tidak sekadar dilihat sebagai kontribusi militer, tetapi juga instrumen politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikuatkan dalam wawancara dengan pejabat Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI yang dimuat dalam *Kompas* (Hamdani, 2022), di mana disebutkan bahwa setiap personel yang dikirim harus memahami misi diplomatik, bukan hanya operasi keamanan. PMPP TNI telah mengembangkan kurikulum pelatihan yang memadukan latihan tempur dengan penguatan keterampilan komunikasi dan diplomasi, bahkan melibatkan simulasi peran dengan skenario konflik sosial.

Dalam praktiknya, pelatihan berbasis teknologi modern juga mulai diterapkan. Penggunaan *virtual reality* (VR) dan *augmented reality* (AR) dalam pelatihan memungkinkan personel mengalami simulasi realistis sebelum berangkat ke Lebanon. Studi Holohan (2019) membuktikan bahwa metode pelatihan berbasis simulasi meningkatkan empati dan kesiapan personel menghadapi interaksi dengan warga sipil. Dengan penguatan pada tahap seleksi dan pelatihan, Satgas MCOU diproyeksikan lebih adaptif terhadap kompleksitas operasi UNIFIL.

Dimensi kedua adalah diplomasi militer dalam membangun kepercayaan masyarakat lokal. Wiseman (2011) menjelaskan bahwa diplomasi militer adalah pemanfaatan angkatan bersenjata dalam operasi selain perang untuk mendukung kepentingan diplomatik negara. Dalam UNIFIL, pasukan Indonesia telah dikenal

ramah dan dekat dengan masyarakat Lebanon, terutama melalui program *community outreach*. Laporan *The Daily Star Lebanon* (2021) menyebutkan bahwa Satgas Indonesia rutin mengadakan kegiatan sosial, seperti layanan kesehatan gratis, perbaikan infrastruktur kecil, dan kelas bahasa bagi anak-anak Lebanon. Program ini membuat masyarakat memandang Satgas Indonesia bukan sekadar pasukan asing, tetapi sebagai mitra dalam pembangunan komunitas.

Pengalaman serupa diceritakan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Tyre, Lebanon Selatan, yang diwawancarai oleh *Jakarta Post* (Santoso, 2022). Ia menegaskan bahwa pasukan Indonesia berbeda dari kontingen negara lain karena lebih terbuka dan mudah berinteraksi dengan warga lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa diplomasi militer tidak semata berbicara tentang operasi pertahanan, tetapi juga representasi identitas bangsa di mata dunia. Melalui interaksi humanis ini, TNI mampu memadukan kekuatan keras (*hard power*) dengan kekuatan lunak (*soft power*), sehingga meningkatkan legitimasi misi UNIFIL sekaligus memperkuat citra Indonesia.

Lebih jauh, diplomasi militer Indonesia di Lebanon memiliki implikasi strategis. Menurut Bellamy dan Hunt (2021), tingkat keberhasilan operasi perdamaian sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat lokal terhadap *peacekeepers*. Dalam hal ini, Satgas Indonesia berhasil menampilkan wajah militer yang humanis, yang sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di PBB. Dengan reputasi positif tersebut, Indonesia juga semakin diakui sebagai negara yang layak mengajukan diri sebagai *troop-contributing country* utama dalam misi masa depan.

Aspek ketiga adalah pembelajaran dari pengalaman lapangan yang diperoleh melalui sumber primer. Wawancara dengan personel Satgas MCOU yang dipublikasikan oleh *Antara News* (2023) mengungkapkan bahwa kendala terbesar bukan hanya medan operasi, tetapi juga faktor psikologis ketika menghadapi ketidakpastian dan ancaman sporadis. Tekanan psikologis ini menuntut adanya dukungan mental berkelanjutan. Lincoln dan Guba (1985) menekankan pentingnya sistem dukungan psikologis untuk menjaga *trustworthiness* penelitian kualitatif, dan hal ini paralel dengan kebutuhan menjaga ketahanan mental prajurit di lapangan.

Selain itu, media internasional seperti *UN News* (2022) melaporkan bahwa personel Indonesia di UNIFIL juga menghadapi kendala bahasa, mengingat mayoritas masyarakat Lebanon menggunakan bahasa Arab. Untuk mengatasi hal ini, beberapa Satgas mengikuti kursus intensif bahasa Arab sebelum berangkat, meskipun keterbatasan waktu pelatihan membuat penguasaan bahasa belum optimal. Kendala komunikasi ini sering menjadi penghalang dalam membangun kepercayaan penuh

dengan masyarakat. Namun demikian, pendekatan personal yang empatik, sebagaimana dilaporkan oleh Curran (2024), terbukti lebih menentukan dibanding sekadar keterampilan linguistik.

Pengalaman di lapangan juga menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi. *Kompas* (2023) melaporkan bahwa Satgas Indonesia mulai menggunakan drone untuk pemantauan wilayah berisiko tinggi, sehingga mengurangi risiko bagi personel. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan tren modernisasi operasi perdamaian global (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Dengan mengintegrasikan teknologi, strategi militer, dan diplomasi humanis, Satgas MCOU dapat memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan UNIFIL.

Secara keseluruhan, ketiga aspek di atas memperlihatkan bahwa diplomasi militer Indonesia dalam UNIFIL adalah kombinasi antara strategi penguatan sumber daya manusia, pendekatan diplomasi berbasis interaksi sosial, serta pembelajaran empiris dari pengalaman lapangan. Dengan seleksi dan pelatihan yang komprehensif, pasukan yang dikirim memiliki kesiapan fisik, mental, dan diplomatik. Dengan diplomasi militer yang humanis, masyarakat Lebanon menaruh kepercayaan pada kehadiran pasukan Indonesia. Dengan pengalaman lapangan yang diakui, TNI memperoleh pengetahuan strategis untuk memperbaiki sistem seleksi, pelatihan, dan dukungan psikologis di masa depan.

Model penguatan personel Satgas MCOU UNIFIL berbasis MSDM ini menunjukkan bahwa keberhasilan peacekeeping tidak dapat diukur semata dari kekuatan tempur, melainkan dari kemampuan membangun kepercayaan dan adaptasi terhadap kompleksitas sosial. Diplomasi militer Indonesia dengan demikian berfungsi ganda: memperkuat stabilitas global dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia.

Kesimpulan

Diplomasi militer Indonesia dalam UNIFIL melalui Satgas *Military Community Outreach Unit* (MCOU) membuktikan bahwa keberhasilan operasi perdamaian tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan yang dikirimkan, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan misi tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas personel merupakan faktor kunci dalam menjawab kompleksitas tantangan operasional, mulai dari kondisi geografis dan iklim ekstrem Lebanon, dinamika politik domestik yang rumit, hingga interaksi sosial dengan masyarakat lokal yang memiliki budaya, bahasa, dan sensitivitas politik

tersendiri. Dalam kerangka ini, TNI tidak sekadar hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai aktor diplomasi yang membawa misi politik luar negeri Indonesia di bawah payung PBB.

Model penguatan personel berbasis manajemen sumber daya manusia terbukti mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan efektivitas Satgas MCOU. Seleksi multidimensi yang tidak hanya menekankan aspek fisik tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman geopolitik, serta kecerdasan emosional memastikan bahwa prajurit yang dikirim benar-benar siap secara holistik. Pelatihan intensif yang dipadukan dengan teknologi modern seperti *virtual reality* dan *augmented reality* memberikan simulasi realistis yang memperkaya pengalaman sebelum penugasan. Dukungan psikologis berkelanjutan juga menjadi elemen penting, karena tekanan mental di daerah konflik sering kali lebih berat dibanding ancaman fisik. Semua aspek ini bersinergi dengan keterampilan komunikasi lintas budaya yang menjadi jembatan dalam membangun kepercayaan dengan komunitas lokal.

Lebih jauh, pemanfaatan teknologi canggih seperti drone, sistem komunikasi digital, dan analisis data berbasis kecerdasan buatan menegaskan bahwa peacekeeping di era kontemporer tidak lagi dapat mengandalkan strategi konvensional. TNI melalui Satgas MCOU telah mulai mengintegrasikan inovasi teknologi untuk memperkuat kesadaran situasional, meningkatkan keamanan personel, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis. Langkah ini selaras dengan tren internasional di mana operasi perdamaian semakin menuntut profesionalisme, efisiensi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Dengan strategi penguatan SDM yang komprehensif, Indonesia tidak hanya tampil sebagai penyumbang pasukan terbesar di antara negara-negara berkembang, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mampu menunjukkan kualitas kontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Diplomasi militer yang dijalankan TNI di Lebanon memperlihatkan bahwa kekuatan militer Indonesia tidak semata dilihat dari aspek keras (*hard power*), tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan kemanusiaan, solidaritas, dan kepercayaan di tingkat lokal maupun internasional. Dengan demikian, partisipasi Indonesia dalam UNIFIL tidak hanya memperkuat stabilitas kawasan, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten menempatkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen strategis dalam politik luar negeri dan keamanan global.



Daftar Pustaka

- Antara News. (2023, April 12). *Satgas TNI UNIFIL hadapi tantangan medan dan psikologis di Lebanon*. <https://www.antaranews.com>
- Bellamy, A. J., & Hunt, C. T. (2021). *Peace operations and the protection of civilians: New directions and expectations*. Routledge.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Clausewitz, C. von. (1989). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Curran, D. (2024). Learning to protect? Identifying elicitive approaches in protection of civilians training for UN peacekeepers. *Civil Wars*, 26(1), 160–186. <https://doi.org/10.1080/13698249.2024.2302728>
- Daily Star Lebanon. (2021, August 15). *Indonesian peacekeepers win hearts through community outreach*. <https://www.dailystar.com.lb>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Dessler, G. (2020). *Human resource management* (16th ed.). Pearson.
- Diehl, P. F., & Balas, A. (2014). *Peace operations*. Polity Press.
- Habibie Center. (2023). *Laporan kebijakan: Peran Indonesia dalam misi perdamaian PBB*. Habibie Center.
- Hamdani, D. (2022, June 5). *PMPP TNI tegaskan peran diplomasi pasukan perdamaian Indonesia*. Kompas. <https://www.kompas.id>
- Holohan, A. (2019). Role-playing for empathic skills in peacekeeping training. *International Peacekeeping*, 26(4), 558–574. <https://doi.org/10.1080/13533312.2019.1620093>
- Hymes, D. (1974). *Foundations in sociolinguistics: An ethnographic approach*. University of Pennsylvania Press.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Sekretariat Negara RI. Retrieved September 30, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40718/uu-no-34-tahun-2004>



- Indonesia. (2011). *Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Partisipasi Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB*. Sekretariat Negara RI. Retrieved September 30, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40368/keppres-no-85-tahun-2011>
- Jakarta Post. (2022, September 10). *Lebanese community praises Indonesian peacekeepers' empathy*. <https://www.thejakartapost.com>
- Jowell, M. (2018). *Peacekeeping in Africa: Politics, security and the failure of foreign military assistance*. Bloomsbury.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Kebijakan pertahanan Indonesia*. Kemhan RI. Retrieved September 30, 2025, from <https://www.kemhan.go.id>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Mahroza, Jonni., Priyanto, Halkis, M., 2022, *Asymmetric Diplomacy And Securitization In The South China Sea*. AJIS, Vol 11, No. 1,
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. (n.d.). *Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI*. PMPP TNI. Retrieved September 30, 2025, from <https://pmpp-tni.mil.id>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational behavior* (19th ed.). Pearson.
- Santoso, A. (2022, September 10). *Indonesian peacekeepers in Lebanon praised by local communities*. Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com>
- United Nations Peacekeeping. (n.d.-a). *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*. United Nations. Retrieved September 30, 2025, from <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil>
- United Nations Peacekeeping. (n.d.-b). *Troop and police contributors*. United Nations. Retrieved September 30, 2025, from <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>
- UN News. (2022, March 17). *Language barriers remain a challenge for UNIFIL contingents*. <https://news.un.org>
- Wiseman, G. (2011). Military diplomacy. In R. A. Denemark (Ed.), *The international studies encyclopedia* (Vol. 7, pp. 217–233). Wiley-Blackwell.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.